

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negeri yang diberkahi oleh hasil bumi yang melimpah ruah terutama pada aspek pertanian dan ketahanan pangan, saat ini pemerintah sedang gencar – gencarnya berusaha meningkatkan elektabilitas ketahanan pangan untuk pencapaian produksi pertanian kedepan yang lebih maju.

Pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu peran strategis sektor pertanian merupakan tugas yang tidak ringan sehingga kementerian pertanian salah satunya menempatkan jagung, beras, kedelai, daging sapi dan gula menjadi komoditas pangan utama yang diberikan perhatian secara khusus dalam pencapaian target swasembada berkelanjutan (Deptan, 2006: 3).

Dalam rencana strategi Kementerian Pertanian menetapkan beras, sebagai satu dari lima komoditas pangan utama. Kementerian Pertanian menargetkan pencapaian swasembada berkelanjutan atas tanaman pangan pada tahun 2010 – 2014 yakni padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar karena padi sudah pada posisi swasembada mulai 2007, maka target pencapaian selama 2010 – 2014 adalah swasembada berkelanjutan dengan sasaran produksi padi sebesar 75,5 juta ton GKG (Gabah Kering Giling) (Kementerian Pertanian, 2010: 2).

Penyediaan pangan terutama beras dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau masyarakat luas tetap menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Selain merupakan makanan pokok lebih dari 95 % rakyat Indonesia, bercocok tanam padi (*Oryza sativa*) juga telah menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 20 juta rumah tangga petani pedesaan serta melalui program peningkatan Produksi Beras Nasional, antara lain melalui penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang dan pengendalian hama penyakit (Arifin, 2008: 3).

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas yang telah dilakukan ditahun – tahun sebelumnya, namun hal ini belum

cukup dan masih diperlukan terobosan ditahun berikutnya. Pemenuhan kebutuhan pangan yang terus tumbuh selaras dengan lajunya pertumbuhan penduduk namun hal itu bukanlah pekerjaan mudah, karna itu diperlukan upaya – upaya peningkatan produksi beras sejalan dengan kebutuhan yang semakin meningkat tersebut. Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengintensifikasi atau mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui penanaman tiga kali dalam setahun.

Pencapaian produksi pertanian tidak terlepas dari gangguan-gangguan sistem produksi yang dialami dilapangan. Berbagai serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan gangguan akibat anomali iklim/ bencana alam sering mengakibatkan kerugian hasil yang cukup besar. Serangan OPT menyebabkan produk rusak, berlubang, busuk, ukuran tidak optimal, maupun tampilan yang kurang optimal sangat berpengaruh terhadap pencapaian standar mutu yang diinginkan. Sementara itu residu pestisida yang digunakan untuk pengendalian OPT, selain berbahaya juga berpengaruh terhadap pencapaian mutu yang sesuai dengan tuntutan pasar (konsumen). Dengan pengelolaan perlindungan tanaman yang baik, diharapkan gangguan-gangguan tersebut dapat dihilangkan atau diminimalisasikan, sehingga pencapaian target produksi tidak terganggu (Direktorat Bina Perlindungan Tanaman, 1996: 1).

Petugas pengamat hama mempunyai peran yang sangat besar sekaligus menjadi ujung tombak keberhasilan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di lapangan. Kelembagaan perlindungan yang mewadahi pengamat organisme pengganggu tumbuhan adalah Unit Pembinaan Proteksi Tanaman, berjumlah 500 unit, dilengkapi dengan Unit Pembinaan Proteksi Tanaman 3 orang per unit. Pada awal perkembangannya, Unit Pembinaan Proteksi Tanaman didesain menjadi ujung tombak untuk pelaksanaan pengamat organisme pengganggu tumbuhan di lapangan. Kenyataannya saat ini jumlah petugas pengamat hama atau petugas Unit Pembinaan Proteksi Tanaman semakin berkurang karena sebagian besar telah alih tugas ke instansi lain atau purna tugas/ pensiun dan rekrutmen penggantinya relative tidak berjalan sesuai kebutuhan.

Pada tahun 2013, jumlah petugas pengamat hama OPT hanya 961 orang yang tersebar di 27 Provinsi. Upaya daerah dalam rangka merekrut petugas pengamat baru telah dilakukan, namun jumlahnya belum memadai dan rekrutmen baru relatif tidak sesuai dengan kebutuhan serta kualitasnya belum memenuhi kriteria untuk menjadi seorang petugas pengamat. Selain itu biaya operasional UPPT dan petugas pengamat OPT semakin berkurang sehingga pengamat serangan OPT tidak optimal (Kementrian Pertanian, 2014: 4).

Provinsi Gorontalo juga merupakan Provinsi yang membudidayakan tanaman pangan yaitu tanaman padi sawah menurut kota dan jenis irigasi di provinsi gorontalo pada tahun 2012 lahan sawah 31.265 Ha, lahan bukan sawah 460.130 Ha, lahan bukan pertanian 679.612 Ha. Lahan padi sawah menggunakan irigasi rata-rata adalah 25.003 Ha, tadah hujan 5.949 Ha, pasang surut 253, lebak 30 Ha, jadi jumlah luas lahan Provinsi Gorontalo dalam angka 2013 adalah 31.265. sedangkan luas panen, produksi dan produktivitas rata-rata di Provinsi Gorontalo yaitu luas panen tahun 2012 mencapai 51.155 Ha sedangkan produksi padi sawah berkisar 245.666 ton dan produktivitas mencapai 48.02 Kw/Ha (Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2013: 14-15).

Tenaga pengamat hama di Provinsi Gorontalo di Tahun 2014 yaitu sebanyak 15 tenaga petugas pengamat hama yang ada di Kabupaten dan Kota Gorontalo. Sedangkan petugas yang tersebar di Kecamatan Bulango Selatan hanya 1 orang dan merekrut beberapa kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bone Bolango tersebut. Dengan adanya petugas pengamat ini Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang maju dan berkembang dalam produksi usahatani padi.

Dalam upaya peningkatan produksi padi sawah banyak kendala yang dihadapi, salah satunya adalah serangan hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi sawah yang ada di Indonesia terutama di Provinsi Gorontalo yang terletak di Kecamatan Bulango Selatan yang banyak di serang oleh hama dan penyakit tanaman, sehingga dapat berdampak pada produktivitas padi itu sendiri. Hama dan penyakit tanaman bersifat dinamis dan perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan biotik

(fase pertumbuhan tanaman, populasi organisme lain) dan abiotik (iklim, musim, agroekosistem).

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo yang membudidayakan tanaman padi sawah dimana luas lahan sawah mencapai 2.059 Ha, lahan bukan sawah 39.532 Ha, lahan bukan pertanian 116.991 Ha, sedangkan menurut Kabupaten dan jenis irigasi pada tahun 2012 yaitu 2.051 Ha, tadah hujan 8, pasang surut Nol, dan lebak Nol sehingga bila dijumlahkan totalnya akan menjadi 2.050 Ha. Sedangkan luas panen, produksi dan produktivitas di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2012 berkisar 2.797 Ha. Sedangkan produksi padi sawah berkisar 15.172 ton dan produktivitas mencapai 54.24 Kw/Ha (Badan Pusat Statistik Bone Bolango, 2013: 15).

Dari uraian diatas Penempatan Tenaga Pengamat Hama adalah ditujukan untuk membantu petani dalam tugasnya. Peningkatan produksi dengan tugas utama melalui Pengendalian Hama Terpadu. Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian yang di formulasikan dalam judul “ Peran Pengamat Hama Dalam Upaya Peningkatan Produksi Usahatani Padi Sawah Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Studi kasus Di Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Faktor – faktor apa saja yang menjadi kendala petugas pengamat hama dalam melakukan tugasnya sebagai pengamat hama di Kecamatan Bulango Selatan?
2. Bagaimana peran pengamat hama terhadap peningkatan produksi dan pendapatan usahatani padi sawah yang ada di Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi kendala petugas pengamat hama dalam melakukan tugasnya di Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan.
2. Untuk mengetahui peran hama terhadap peningkatan produksi dan pendapatan usahatani padi sawah yang ada di Desa Ayula Timur Kecamatan Bulango Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengamat pada pertanian dengan mempertimbangkan sistem pendanaan yang dapat mempengaruhi kinerja para pengamat pertanian.
2. Sebagai bahan pertimbangan pengamat pertanian dalam membuat materi yang selalu baru dan pragmatis sesuai dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Pertanian.
3. Sebagai wadah dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam peranan pengamat bagi petani.